

Judul : Pemerintah Kewalahan Cegah Pelajar Berunjuk Rasa di DPR
Tanggal : Selasa, 01 Oktober 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1



Polisi meredam massa pelajar dalam unjuk rasa yang berakhir ricuh di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta, kemarin.

Pemerintah Kewalahan Cegah Pelajar Berunjuk Rasa di DPR

Meski pengawasan diperketat, tetap saja banyak siswa yang ikut berdemonstrasi di Senayan.

Suseno
suseno@tempo.co.id

DEPOK – Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, Aang Karyana, mengatakan pemerintah telah berupaya mencegah pelajar untuk melibatkan diri dalam unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta. Namun upaya tersebut sejauh ini tidak membawa

hasil yang diharapkan.

“Sebetulnya koordinasi sudah maksimal. Kami sudah koordinasi dengan pemda setempat, MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), dan aparat keamanan, tapi masih saja ada pelajar yang ikut unjuk rasa,” kata Aang, kemarin.

Aang mengatakan, di Depok dan Bogor, instansi telah mengambil langkah preventif dengan memperketat pengawasan siswa di sekolah. Bahkan

satuan tugas dibentuk guna membantu pengawasan ini. “Kepala sekolah sudah diminta untuk mengabsen siswa pada pagi, siang, sore,” katanya. “Bahkan kami instruksikan agar gerbang sekolah digembok hingga jam pelajaran berakhir.”

Faktanya, kata Aang, masih ada ratusan pelajar dari Depok dan Bogor yang berangkat ke Senayan. Berdasarkan laporan yang ia terima, kemarin memang banyak siswa yang tidak

masuk sekolah tanpa izin. “Jadi mereka berangkat tapi tidak datang ke sekolah, sehingga tidak terpan- tau oleh pihak sekolah,” katanya.

Aang menegaskan bahwa tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelajar yang terbukti ikut berunjuk rasa itu. Namun ia telah berkoordinasi dengan kepolisian dan meminta untuk mencatat nama siswa yang ditangkap karena berunjuk rasa. “Kami meminta polisi

mencatat nama siswa sebagai bagian evaluasi dengan orang tua,” katanya.

Kebijakan serupa diambil oleh pemerintah Jakarta. Gubernur Anies Baswedan menginstruksikan kepala sekolah untuk memperketat pengawasan. “Sekolah memberlakukan absensi pagi dan siang, jadi kita memastikan setiap anak menjalankan kegiatan belajar hingga tuntas di sekolah,” ujar Anies, kemarin.

Anies meminta kepala sekolah untuk memastikan keberadaan setiap siswanya selama jam pelajaran berlangsung. Jika ada siswa yang tidak berada di kelas pada jam pelajaran, ia meminta sekolah untuk segera menghubungi orang tua siswa.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Riyatno, menegaskan bahwa sebagian besar siswa sekolah menengah belum dikategorikan dewasa. “Mereka baru dalam tahap menuju dewasa,” katanya. “Mereka masih mudah terpancing dan terprovokasi.”

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, mengatakan pengawasan terhadap siswa tidak bisa hanya mengandalkan guru-guru di sekolah. Karena itu, orang tua juga harus ambil bagian dalam pengawasan ini. “Diimbau, orang tua juga meningkatkan pengawasan,” katanya. “Pengawasan orang tua ini dilakukan di luar jam pelajaran sekolah.”

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebelumnya mengimbau, demi menjaga keselamatan anak, sekolah dan orang tua memantau siswa agar tidak ikut berunjuk rasa di DPR. Alasannya, situasi yang timbul dalam unjuk rasa tidak bisa diprediksi. Sehingga dikhawatirkan siswa bisa menjadi korban. “Kami imbau semua pihak agar tidak melibatkan anak karena anak bisa menjadi korban dari hal-hal yang harusnya tidak terjadi,” kata Ketua KPAI Susanto.

Komisiner KPAI Retno Listyarti mengatakan telah mengirim surat edaran ke sejumlah instansi pemerintah mengenai penanganan pelajar yang terlibat unjuk rasa. Menurut dia, anak adalah manusia yang belum dewasa. Ketika melakukan kesalahan, anak harus diberi kesempatan memperbaiki diri karena masa depannya masih panjang. “Karena itu, sanksinya jangan siswa dikeluarkan dari sekolah,” katanya. “Demi kepentingan terbaik bagi anak.”

© ADE RIDWAN YANDIWIPTA |
ADI WARSONO | TAUFIQ SIDIQ